

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

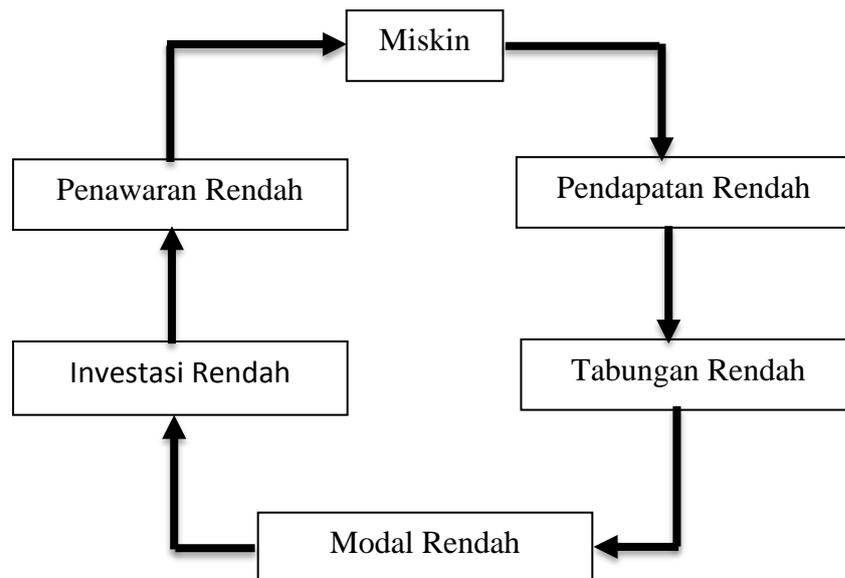
A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana ketidakmampuan suatu individu atau masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat. (Suryawati, 2004). Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial politik.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat sangat kompleks dan multidimensi. Tingkat penghasilan yang relatif kecil seringkali dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kemiskinan, padahal tingkat penghasilan yang rendah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan di suatu Negara atau daerah.

Kemiskinan dapat dipandang sebagai suatu hal yang bersifat absolute dan relatif. Secara umum kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan (Ismuningsih, 2010).



Gambar 2.1

Lingkaran Kemiskinan

Keadaan masyarakat yang disebut miskin dapat kita ketahui melalui tingkat pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Standar hidup masyarakat bukan hanya sekedar tercukupinya segala kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, melainkan tercukupinya pula kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan mereka (Nugroho dalam, Musa 2014).

Salim (1980) mengartikan kemiskinan dalam artian yang lebih spesifik: “iya memandang kemiskinan yang digambarkan sebagai rendahnya tingkat pendapatan yang digunakan sebagai sarana

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari” yang dimaksud kebutuhan sehari-hari disini termasuk kebutuhan pokok, seperti kesehatan, kehidupan yang layak, sifat saling menghargai, dan kehormatan yang diperoleh layaknya orang lain serta kebebasan dalam lingkungan bermasyarakat. Apabila kita lihat melalui *public policy* terdapat 2 aspek kemiskinan :

1. Aspek primer, dalam aspek ini digolongkan masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hal wawasan, keterampilan, keorganisasian dalam bidang sosial maupun politik, serta miskinnya asset.
2. Aspek sekunder, yang dimana meliputi jaringan sosial, keuangan, dan informasi yang kurang.

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan seimbang sehingga membuat kesenjangan pendapatan antar masyarakat menjadi melebar (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Dalam Negara berkembang dan Negara-negara dunia ketiga persoalan kemiskinan ini tidak hanya sekedar ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004).

Setiap Negara termasuk Indonesia memiliki definisi sendiri untuk mengukur masyarakat yang dikategorikan miskin. Ini karena kondisi masyarakat yang di sebut miskin bersifat relatif untuk setiap Negara maupun daerah, misalnya kondisi sosial, ekonomi, dan standar kesejahteraan. setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi di suatu daerah tertentu, seperti rata-rata pendapatan, daya beli atau kemampuan konsumsi, pendidikan dan kesehatan.

kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan banyaknya jumlah pengangguran dimana selanjutnya hal itu menyebabkan ketimpangan pendapatan serta kesenjangan pendapatan serta kesenjangan antar golongan penduduk, yang dimana kondisi seseorang atau masyarakat dalam standar yang rendah (Saragih, 2014).

2. Macam-macam Kemiskinan

1. Kemiskinan absolut (*absolutely poor*)

Kondisi dimana seorang individu yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan absolut juga sering dikatakan sebagai kemiskinan yang sangat serius (*extreme*) dimana masyarakat benar-benar kekurangan sandang, pangan ,dan papan. (Hudianto, 2014).

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan ini tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas sebagai analogi pendapatan diperoleh seseorang dikawasan elit, walaupun seseorang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dinamakan sebenarnya memiliki pendapatan yang cukup, tetapi jika dinilai dalam lingkungan masyarakat yang ada disekitar tempat tinggalnya maka pendapatan yang diperoleh masih tergolong rendah dan dibawa rata-rata karna pembangunan yang belum menjangkau semua masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.(Hudianto, 2014)

3. Kemiskinan kultural

Permasalahan dalam kemiskinan kultural ini mengacu pada persoalan sikap suatu individu maupun masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak ada keinginan untuk merubah tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif walaupun ada bantuan dari pihak lainya.

4. Kemiskinan Struktural

Suatu situasi kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang ada dalam suatu system sosial, budaya dan politik yang kurang mendukung dalam pembebasan kemiskinan, tetapi malah menyebabkan timbulnya kemiskinan.

3. Ukuran Tingkat Kemiskinan

Banyak persepsi dan perbedaan dalam ukuran tingkat kemiskinan dalam penelitian terdahulu dan yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah rangkuman dari beberapa peneliti sebelumnya diantaranya adalah :

- a) Dalam padangan BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yang dimana satu orang memerlukan kalori sebanyak 2100 per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibebankan antara wilayah perdesaan dan perkotaan). Patokan ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk.
- b) Menurut Sayogyo dalam (Hudianto, 2014) tingkat kemiskinann didasarkan jumlah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang dalam tahun dan dibagi dengan wilayah perdesaan dan perkotaan.

Daerah perdesaan:

- (1) Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang dalam tahun.

- (2) Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang dalam tahun.
- (3) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang dalam tahun.

Daerah perkotaan :

- (1) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang dalam tahun
- (2) miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang dalam tahun.
- (3) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang dalam tahun.

Ukuran tingkat kemiskinan menurut bank dunia pada awalnya bank dunia menggunakan nilai pendapatan yang disertakan dollar sebagai ukurannya. Pendapatan nominal orang yang hidup diperkotaan mempunyai nilai riil yang berbeda dengan masyarakat perdesaan. Tingkat kebutuhan hidup di kota yang lebih tinggi dari pada di perdesaan membuat pendapatan riil di perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan, untuk itu bank dunia membedakan garis kemiskinan untuk masyarakat daerah perkotaan dan perdesaan. Untuk perkotaan garis kemiskinan ditetapkan 70 dollar amerika, sedangkan untuk daerah perdesaan ditetapkan sebesar 50 dollar amerika perkapita pertahun, (hudianto, 2014:49).

4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda-beda, oleh karena itu agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukn secara tepat maka hal yang perlu dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan yang muncul secara lengkap.

Ada banyak penyebab seseorang masuk dalam kategori miskin. Menurut *World Bank* setidaknya ada sekitar tiga penyebab utama kemiskinan, antarlain :

- Rendahnya tingkat pendapatan dan aset untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti makanan pokok, tempat tinggal, pakaian, kesehatan serta pendidikan.
- Ketidakmampuan untuk bersuara dan tidak ada kekuatan institusi Negara maupun masyarakat yang melindungi.
- Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan penangulangannya.

Bank dunia memiliki indikator-indikator kemiskinan yang terdiri dari :

1. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Pembangunan yang bias di kota
4. Perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat
5. Perbedaan sumberdaya manusia dan sektor ekonomi

6. Rendahnya produktivitas
7. Budaya hidup yang kurang baik
8. Tata kelolala pemerintahan yang buruk
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan

Sedangkan menurut Shrap (1996) dalam Kuncoro (1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi.

- Pertama, secara mikro kemiskinan muncul dikarenakan adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan tidak merata. Kebanyakan masyarakat miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- Kedua, kemiskinan juga muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, dengan tingkat SDM yang rendah membuat tingkat produktivitasnya rendah yang dimana membuat upahnya rendah, rendahnya tingkat sumberdaya manusia ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, adanya diskriminasi, dan faktor keturunan.
- Ketiga, faktor kemiskinan lainnya adalah tingkat perbedaan akses modal dalam masyarakat.

Dalam penjelasan diatas kemiskinan memiliki banyak pengertian namun dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau masyarakat ingin lepas

darinya. Yang dimana seseorang menjadi miskin bukan karena kelemahannya melainkan hal tersebut terjadi diluar kendali. Biasanya karna adanya kebijakan yang kurang tepat dari institusi Negara atau pemerintah yang kurang memperhatikan suara masyarakat miskin.

5. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Dari prespektif islam kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural diantaranya adalah :

- a. Kemiskinan mulcul karna ketidakpedulian dan kebahtilan sekelompok masyarakat kaya (QS Ali Imron : 180), menimbun harta (QS Al Ma'aarij : 18) sehingga masyarakat miskin tidak mampu keluar dari kemiskinan
- b. Kemiskinan timbul karna sebagian besar manusia bersifat dzalim, eksploitatif, dan menindas sebagian manusia lainnya, seperti memakan harta orang lain secara bathil (QS At taubah : 34), dan memakan harta anak yatim (QS An Nisa' : 2,6,10) dan memakan harta riba (QS Al Baqoroh : 275).
- c. Kemiskinan timbul karena kosentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah fir'aun,haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat mesir dimasa hidup Nabi Musa as (QS Al Qashash :1-88).

6. Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan badan pusat statistik (BPS,2016) jumlah penduduk merupakan sekelompok orang yang tinggal pada suatu wilayah atau daerah terhitung dalam waktu 6 bulan atau lebih, serta mempunyai pekerjaan yang menetap di daerah tersebut dan tercatat sah sebagai penduduk,

Dalam pembangunan ekonomi, meningkatnya penduduk disuatu daerah dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat, dapat dikatakan menjadi faktor pendorong apabila membuat daya beli masyarakat meningkat yang membuat perusahaan ingin menambah jumlah produksi mereka yang dimana akan terbukanya lapangan pekerjaan dan berdampak penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga dalam daerah tersebut. Sedangkan jumlah penduduk bila dikatakan sebagai faktor penghambat apabila di suatu daerah terjadi perluasan pasar barang dan jasa, dalam perluasan pasar tersebut yang ditunjang dengan 2 faktor yaitu, pendapatan penduduk serta jumlah penduduk, jika tingginya jumlah penduduk namun tidak diimbangi dengan keterampilan dan skill yang menunjang dikarenakan pendidikan rendah ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam proses pembangunan suatu daerah atau Negara dibutuhkan pemerataan khususnya di sektor pendidikan karena sangat penting untuk

menunjang kualitas sumberdaya manusia yang ada di Indonesia (sukirno,1997).

Kecenderungan umum kenaikan jumlah penduduk pada suatu Negara berdasarkan deretan ukur yaitu duakali lipat setiap 30-40 tahunnya. Namun pada saat yang bersamaan kenaikan jumlah penduduk ini membuat minimnya persediaan pangan dikarenakan tanah yang semula digunakan sebagai lahan produktif untuk pertanian berubah menjadi perumahan atau tempat tempat non produktif lainnya, hal ini membuat persediaan pangan cenderung tetap atau bahkan bisa turun. Menurut (Maltus dalam adhi, 2011). Mendefinisikan kenaikan jumlah penduduk akan membuat produksi pangan capital akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang akan berdampak pada jumlah penduduk yang tidak pernah setabil, atau sedikit diatas tingkat substansi.

Pada kalangan pakar pembangunan telah ada konsesus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap penawaran (*supply*) bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi proses pengembangan tabungan, cadangan devisa, serta sumberdaya manusia (Maier dalam Kuncoro, 1997).

Terdapat 3 alasan yang dimana kenaikan jumlah penduduk yang cenderung tinggi akan mengakibatkan perlambatan proses pembangunan antarlain:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membutuhkan konsumsi yang tinggi dimasa yang akan datang. Rendahnya sumberdaya akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, yang pada gilirannya akan membuat investasi di dalam “kualiatas manusia” semakin sulit
2. Masih banyak Negara yang dimana penduduknya masih sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan kenaikan jumlah penduduk yang tinggi ini akan mengancam kesinambungan sumberdaya alam yang semakin langka. Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern.
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semaikin sulit untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran bayi merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat diaman berdampak pada terjadinya masalah-masalah baru yang mulcul dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dalam suatu daerah, apabila tidak didukung oleh keterampilan dan skiil yang baik serta kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai maka akan berakibat kepada banyaknya pengangguran pada daerah

tersebut (Sukirno, 1997). Jika tingkat pengangguran tinggi maka akan berakibat kepada masyarakat yang dimana mereka tidak menerima upah atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan terjadi.

Todaro (2000), menyatakan bahwa tingginya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, yang dimana dibuktikan dengan perhitungan indeks Foster Greer Thorbecke (FGT), yang dimana ia mengatakan dengan cara uji tersebut jika jumlah penduduk semakin bertambah pada suatu daerah atau Negara maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan pada daerah atau Negara tersebut.

7. Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan dimana kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang untuk kegiatan ekonomi kepada warga negaranya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznetz dalam Todaro, 2004). Menurut pandangan Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah suatu keadaan dimana bertambahnya pendapatan masyarakat yang terjadi dalam

suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut pandangan para ekonom klasik, seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill, maupun ekonom neo klasik, seperti Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya:

- 1.) Jumlah penduduk
- 2.) Jumlah stok barang modal
- 3.) Luas tanah dan kekayaan alam dan
- 4.) Tingkat teknologi yang digunakan

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2003). Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau daerah hanya bisa diterapkan oleh entrepreneur melalui inovasi mereka.

Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan suatu output per-kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ini berkaitan dengan kenaikan output per-kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total

yaitu (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Yang dimana output per-kapita adalah output total dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk (Aditya, 2010).

Menurut Todaro (2003), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi diantaranya:

1. Akumulasi modal: hal ini meliputi semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumberdaya manusia. Akumulasi suatu modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan di tabung dan kemudian di investasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dimasa yang akan datang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yang berupa jalan, air bersih, listrik, komunikasi, fasilitas sanitasi, yang kedepanya ditujukan untuk menunjang aktivitas ekonomi yang produktif. Investasi dalam hal sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja: pertumbuhan penduduk dan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak usia angkata kerja semakin produktif pula tenaga kerja,

sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi, ada tiga klarifikasi kemajuan teknologi, yakni:
 - a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, hal ini terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
 - b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving) atau hemat modal (capital saving) yaitu tingkat output lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
 - c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, hal ini terjadi apabila penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Menurut Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Pembangunan ekonomi pada suatu Negara atau daerah tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi juga harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu Negara atau daerah dalam pembangunan dan merupakan syarat atau keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Karena dengan naiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka pendapatan masyarakat juga akan semakin baik yang membuat masyarakat bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun pemerataan pendapatan juga harus di perhatikan jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang semakin baik ini hanya bisa dinikmati orang-orang menengah keatas saja.

8. Pengaruh Variabel Gini Ratio Terhadap Kemiskinan

Gini ratio merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang relative antar penduduk suatu Negara atau daerah yang telah diakui secara luas. Gini ratio dapat pula digunakan untuk bahan analisis perbandingan pendapatan relative antar masyarakat. Dalam mengukur distribusi pendapatan, bank dunia membagi jumlah penduduk atas tiga kelompok, yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% berpendapatan menengah dan, 20% penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi.

Salah satu kritik marshall (1959) yang sangat keras terhadap david ricardo dan pengikutnya adalah bahwa dalam pengembangan ilmu ekonomi terdapat kemajuan pesat, tetapi mereka tidak

mengindahkan bahwa orang-orang miskin telah menyebabkan kemiskinan. Mereka tidak melihat bahwa kemiskinan adalah penyebab utama dari ketidakefisienan yang kemudian menyebabkan kemiskinan.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, baik itu dinegara maju maupun berkembang. Dalam hal ini pemerintah harus mengambil upaya dan melakukan kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi di masyarakat, serta peningkatan distribusi pendapatan dan taraf hidup layak untuk masyarakat menengah ke bawah.

Distribusi pendapatan merupakan pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan menjadi siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat yang lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumberdaya alam, atau sampai faktor keahlian.(hudianto,2014)

Evolusi kesenjangan dalam distribusi pendapatan pada awalnya didominasi oleh sesuatu yang biasanya di sebut sebagai hipotensis Kuznets. Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari surve atau observasi disetiap Negara (time-

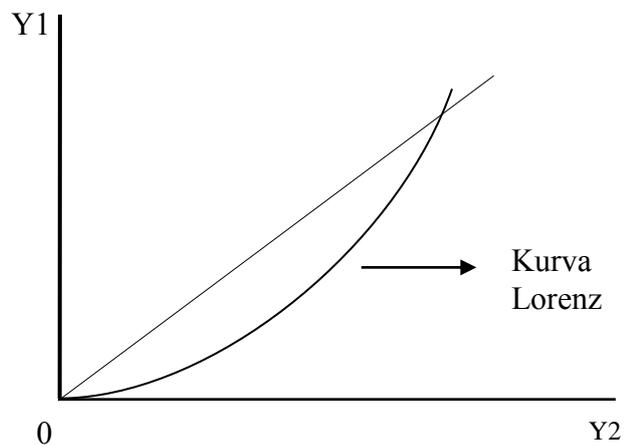
series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per-kapita berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transmisi dari suatu ekonomi perdesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri.

Simon Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahapan selanjutnya distribusi pendapatan akan cenderung mengalami perbaikan. Namun pada pemahaman ekonomi kontemporer teori yang diungkapkan Kuznets tidak begitu dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya, karena semua tetap tergantung proses pembangunan yang dilakukan oleh Negara yang bersangkutan. Todaro (2006).

Kondisi ketimpangan pendapatan yang cukup besar terjadi menimbulkan perbedaan pendapatan yang timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal. Karakteristik suatu wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan

terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah yang terjadi di Indonesia.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan biasanya menggunakan Indeks Gini (gini ratio) yang dimana merupakan suatu ukuran pemerataan yang diukur dengan membandingkan luas yang dibentuk antara diagonal dan Kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Dalam kurva Lorenz, garis diagonal merupakan penjelasan dari pemerataan pendapatan di setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan presentase penduduk yang berada di suatu wilayah yang sama dengan presentase penerimaan pendapatan. Sugianto dkk (2005).



Gambar 2.2
Kurva Lorenz

Gini ratio bernilai antara 0 -1. Dimana dalam nilai 0 berarti pemerataan pendapatan sempurna dimana masyarakat mempunyai

penghasilan yang relatif sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketidak merataan sempurna dimana dalam hal ini penghasilan penduduk hanya berpusat di lasah satu daerah atau wilayah saja. Semakin besar nilai kosentrasi gini ratio maka semakin besar pula kemungkinan ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. (Badan Pusat Statistik). Yang dirumuskan seperti berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(f_{ci} + f_{ci+1})$$

Keterangan :

GR : Koefisien Gini

F_{PI} : Frekuensi penduduk dalm kelas pengeluaran ke-i

F_{CI} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas ke-i

F_{CI-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas ke-i-1

Dalam setiap pembangunan pastilah muncul masalah-masalah yang dimana salah satunya adalah ketimpangan, yang dimana masalah ketimpangan ekonomi ini lazim di dibicarakan, ketimpangan pembangunan ekonomi secara wajar memang akan terjadi dalam proses pembangunan ekonomi biasanya setiap daerah mempunyai tingkat SDM, infrastruktur dan sumber daya alam yang berbeda. Jawa timur sebagai salah satu provinsi diindonesia yang terletak di kepulauan jawa juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang paling penting untuk dipantau karena pemerataan hasil

pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya proses pembangunan yang terjadi di suatu daerah harus di maksimalkan dan menekan nilai ketimpangan agar tidak semakin melebar. Arsyad (1997).

Masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan biasanya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap masyarakat miskin, dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah tersebut yang tidak diimbangi dengan tingkat lapangan pekerjaan akan membuat masyarakat sekitar menjadi pengangguran, karna keadaan mengangur maka masyarakat atau seseorang tersebut tidak mempunyai pendapatan sedangkan pengeluaran tiap hari terus ada. Hal ini membuat jarak distribusi pendapatan semakin melebar. Todaro (2000).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prastyo (2010) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan” yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, penelitian ini menggunakan periode waktu dari tahun 2003-2007. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan model regresi yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Yang dimana nilai Adjusted R^2 sebesar 0,982677.

Setahun selanjutnya tepatnya di tahun 2011 Putra melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007” variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen adalah indeks gini dan indeks Williamson. Dalam pengujian asumsi klasik yang meliputi uji Multikolinearitas, uji Autokorelasi dan uji Heterokedastisitas, menunjukkan distribusi normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai F sebesar 16,686 (probabilitas=0,006) dan koefisiensi determinasi (adjusted R^2) sebesar 0,870. Melalui hasil tersebut diperoleh

secara signifikan oleh tingkat ketimpangan pendapatan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan indeks Williamson (dengan nilai 1,834) dan indeks gini (dengan nilai 0,477). Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Williamson lebih berpengaruh dibandingkan Indeks Gini.

Empat tahun selanjutnya, Susanti (2015) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat” studi ini meneliti tentang pengaruh PDRB, IPM dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2011. Tujuan dari penelitian kali diharapkan dapat menganalisis bagaimana dan seberapa besar PDRB, IPM dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier panel data dengan bantuan STATA 9. Dari hasil penelitian menunjukkan kalau PDRB, pengangguran dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Selanjutnya di tahun 2016 Nurlaili melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2007-2013” Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan merupakan data *crosssection* 6 provinsi se-jawa dan *time series* pada tahun 2007-2013. Dalam penelitian kali ini data di olah menggunakan model data panel dengan regresi *fixed*

effect model. Pada penelitian ini seluruh variabel berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara persial variabel PDRB per-kapita, Populasi Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

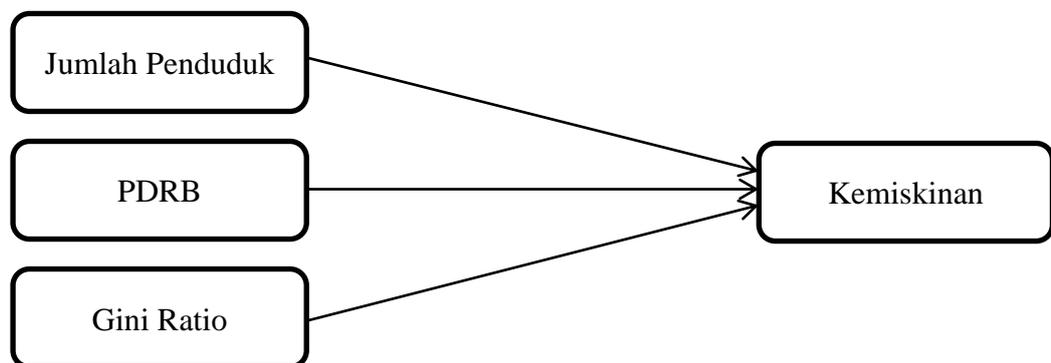
Di tahun yang sama Lestari (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012”. Dan Dimana Mu’amala (2016) meneliti “Determinan Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2008-2014”. Hasil dari penelitian lestari menunjukkan bahwa probabilitas pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan inflasi adalah 0,000 yang artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan hasil dari penelitian Mu’amalah di ketahui bahwa variabel PDRB dan IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan variabel pengangguran dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta.

Miswanda (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015” penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik dengan periode lima tahun yang dimana dimulai dari tahun 2011 sampai

dengan 2015, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Metode yang digunakan untuk mengestimasi model regresi ini adalah metode fixed effect model (FEM). Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pendidikan, upah minimum, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

C. Kerangka teori

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya sudah dipaparkan di awal, maka dalam penelitian kali ini, Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur sebagai variabel dependen di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu PDRB, Gini Ratio, dan Jumlah Penduduk, dimana ketiga variabel tersebut adalah variabel independen. Untuk mempermudah pemahaman konseptual dalam penelitian kali ini, maka digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar. 2.3

Kerangka Teori

D. Hipotensis

Hipotensis merupakan sebuah dugaan permasalahan dalam penelitian ini yang sifatnya masih sementara, yang dimana masih harus dibuktikan secara empiris, Berdasarkan beberapa kajian empiris yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Prastyo (2010), Saputra (2011), dan Susanti (2015) maka didapat hipotensis seperti berikut :

1. Diduga PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Diduga Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Diduga Gini Ratio memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.